

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Lilik Ambarwati
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Email: ambar@stieww.ac.id

Ulva Nur Nova Handayani
Jurusan Akuntansi, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Email: ulvanur12@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the joint effect of the government's internal control system and the accessibility of financial reports on the accountability of village fund financial management, to determine the effect of the government's internal control system to the accountability of village fund financial management, to determine the effect of financial statement accessibility on village fund financial management accountability. Quantitative research method with the type of survey research. The population is all employees of Margokaton Village, Seyegan District, Sleman Regency. The population is 32 respondents. This study uses the entire population to be used as informants as many as 32 respondents. Using data with Likert scale measurement questionnaire. Data Analysis Techniques using Multiple Regression Analysis with F Test, Coefficient of Determination Test (Adjusted R²) and t Test. The results showed that the internal control system had an effect on the accountability of village fund financial management in Margokaton Village, Sleman Regency, Yogyakarta. Accessibility affects the accountability of village fund financial management in Margokaton Village, Sleman Regency, Yogyakarta. Internal control systems and accessibility affect the accountability of village fund financial management in Margokaton Village, Sleman Regency, Yogyakarta together.

Keywords: Government Internal Control Sistem, Accessibility, Accountability.

PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan pemerintah pusat (sentralistik) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralistik dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah terutama desa (Adeliya, 2017).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wahyuni, 2018). Perhatian terhadap desa mulai meningkat setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi di desa guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2019). Pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Wahyuni, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan, salah satu pedomannya adalah asas akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2016). Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengetahui laporan pengelolaan keuangan desa (Aliyah, 2012).

Sistem pengendalian intern pemerintah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan akses laporan keuangan desa disebutkan dalam pasal 72 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010: 218).

Informasi yang akurat dan dapat dipercaya pada penyajian laporan keuangan pemerintah penting karena dengan laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Rahma, 2017). Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka menciptakan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diwajibkan memberikan informasi atas laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Menurut Mardiasmo (2009) masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah, semakin baik akses maka semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Dana Desa membutuhkan perhatian lebih, karena dana desa yang diberikan terus mengalami peningkatan. Seperti halnya Desa Margokaton sebagai salah satu desa di Kecamatan Seyegan yang mendapat dana desa dari pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 1. Dana desa Desa Margokaton tahun 2018-2020

Tahun	Dana Desa	Selisih (Kenaikan Jumlah Dana Desa)
2018	Rp 953.596.000,-	-
2019	Rp. 1.150.243.000,-	Rp 196.647.000,-
2020	1.725.468.000,-	Rp 575.225.000,-

Sumber: www.slemankab.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 dana desa yang diterima Desa Margokaton pada tahun 2018 adalah Rp 953.596.000 dan dana desa yang diterima Desa Margokaton pada tahun 2019 adalah Rp. 1.150.243.000, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.725.468.000,- tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 196.647.000, dan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 575.225.000,-. Selain mengalami peningkatan Dana Desa di Desa Margokaton merupakan penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Sleman. (www.slemankab.go.id).

Peningkatan dana desa menuntut pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa agar asas pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah asas akuntabel dapat terlaksana dengan maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan seluruh 86 kelurahan di Kabupaten Sleman sudah melaporkan laporan realisasi dana desa. Seperti yang diberitakan oleh salah satu koran *online* IDN *Time*

Jogja berikut: Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong kelurahan untuk memaksimalkan penyerapan dana desa setelah anggaran itu untuk Triwulan III cair. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Sleman Budiharjo mendorong setiap kelurahan untuk bisa memaksimalkan penyerapan Dana Desa di Triwulan III. Kelurahan-kelurahan di Sleman sudah memanfaatkan dana desa untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Jika berkaca pada serapan dana desa Triwulan II sebelumnya, masih ditemukan beberapa desa yang memang serapan dana desanya masih di bawah 60 persen. Tahun 2020 sebanyak delapan puluh enam kelurahan sudah menyampaikan laporan. Secara keseluruhan kelurahan di Kabupaten Sleman sudah mengirimkan pelaporan penggunaan Dana Desa. Dari laporan yang ada, banyak kelurahan yang menggunakan Dana Desa tersebut untuk pembangunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, termasuk penanggulangan keadaan darurat seperti COVID-19 (Time, 2020).

Beberapa permasalahan lain yaitu kurangnya pengawasan terkait pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Sleman, dalam berita online menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 desa di Sleman dan diperoleh 96 temuan. Temuan tersebut belum semua ditindaklanjuti, masih ada 52 temuan yang belum ditindaklanjuti. Kondisi yang harus menjadi perhatian serius agar ke depan bisa memperbaiki sehingga tidak terulang kembali, pemerintah desa dapat memanfaatkan Dana Desa dengan efektif, efisien dan benar sesuai aturan. Pemanfaatan dana desa harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman dan setiap uang yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku (Newsletter, 2016).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keperilakuan pengelolaan keuangan sektor publik khususnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa terkait pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pemerintah desa terutama Desa Margokaton Sayegan Sleman dalam pengelolaan dana desa dengan memperhatikan aspek sistem pengendalian internal pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditujukan untuk membangun desa dan mengutrangi ketimpangan yang sudah ada pada jalur cepat sesuai dengan keunggulan dana desa.

Dana desa harus dikelola dengan tepat, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan/pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, namun bukan berarti tidak ada peraturan yang harus digunakan dan ditaati untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa diberikan acuan dan dasar pelaksanaan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya mengelola dana desa. Pengalokasian dana desa harus dilakukan secara konsisten dan terkendali, serta pembuatan laporan harus transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

Dimensi akuntabilitas finansial (Mardiasmo, 2002), yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dimensi akuntabilitas (Rasul, 2002), yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konseptual mengadopsi framework sistem pengendalian intern yang dirilis tahun 1992 oleh *Committee of Sponsoring Organization "COSO framework"*. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hoesada, 2016:181).

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Menurut UU No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwan sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

2. Penilaian Resiko

Tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan

5. Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tercipta suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mustofa, 2012).

Indikator aksesibilitas yaitu keterbukaan, kemudahan, dan *accessible* (Shafira, 2021). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Kajian Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti ada/tidaknya pengaruh signifikan variabel SPIP dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut antara lain:

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011). Iclass, dkk (2014) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil penelitian Primayani, dkk (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat, karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

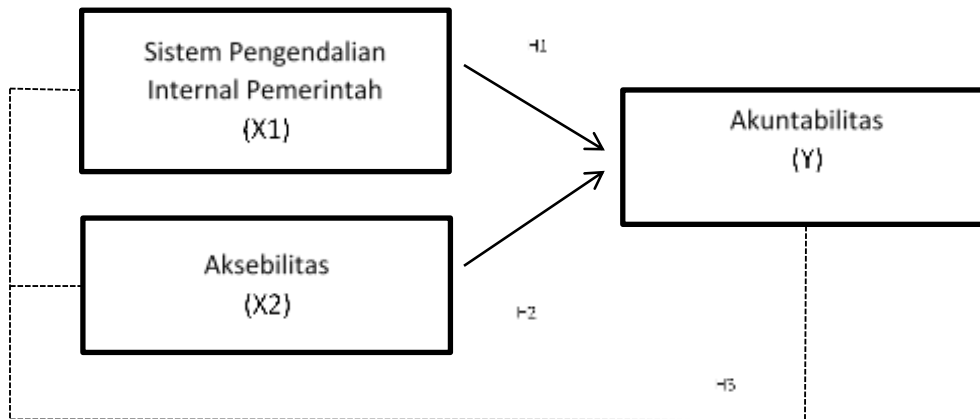
Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Beberapa indikator aksesibilitas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan *accessible* (Wahyuni, 2014). Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Sande (2013) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

H2: Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu (Rahma, 2017).

Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Margokaton Sayegan Sleman Yogyakarta, dengan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian ini mengkombinasi penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengukur dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Dana Desa. Kerangka penelitian yang digunakan disajikan pada gambar 1:



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Desa Margokaton Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman populasi sebanyak 32 responden. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu (Sugiono, 2013: 120). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang sudah dipilih secara cermat, dengan ciri-ciri tertentu sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Kriteria untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut: berdomisili di Desa Margokaton Sayegan Sleman, dan pegawai desa pemerintahan Desa Margokaton Sayegan Sleman. Penelitian ini menguji pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang dana desa. Dengan indikator Mahmudi (2011): (1)Kejujuran dan keterbukaan informasi, (2)Kepatuhan dalam pelaporan, (3)Kesesuaian prosedur, (4)Kecukupan informasi, (5)Ketepatan penyampaian laporan

Variabel independen ada 2 yaitu: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Aksesibilitas. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan indikatornya Hermanto (2019): (1)Lingkungan Pengendalian, (2)Penilaian Resiko, (3)Kegiatan Pengendalian, (4)Informasi dan Komunikasi, (5)Pemantauan.

Akseibilitas adalah Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Dengan indikator Shafira (2021): (1)Keterbukaan, (2)Kemudahan, (3)*Accesible*. Pengukuran ketiga variabel tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner menggunakan skala Likert 5

poin dengan skor 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Netral 4: Setuju, dan 5: Sangat Setuju.

Metoda Analisis Data

Dalam menilai instrument dilakukan uji instrument data yang berupa uji Validitas dan Reliabilitas data. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep yaitu konsistensi (Indriantoro & Supomo, 2009: 180-181). Sedangkan Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam SPSS (*Statistical Production and Service Solution*) versi 21. Persamaan regresi linear berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

a = Koefisien Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

e = Standar Kesalahan

Uji statistik yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji Stimulant (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai sig. < 0.05 atau F hitung > F tabel, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut dasar pengambilan keputusan:

Jika nilai Sig \leq 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima

Jika nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak

Uji Koefisien Determinasi (R^2/R Square)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi, artinya semakin baik kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2013: 98). Berikut rumusan hipotesisnya:

H0: $P=0$ (tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

Ha: $P \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

Menurut kriteria *p* value:

Jika nilai probabilitas $t \leq 0,05$, maka H0 ditolak atau Ha diterima.

Jika nilai probabilitas $t > 0,05$, maka H0 diterima atau Ha ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan pada 32 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Statistik deskriptif dalam hal ini untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas). Statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan menggunakan tabel deskriptif yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Sistem pengendalian internal	32	3	5	4,1875	0,57907
Akseibilitas	32	3	5	4,1771	0,57414
Akuntabilitas	32	3	5	4,2125	0,59879

Uji Instrumen Data

Uji instrument atau kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrument, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen yang dipakai.

Uji Validitas

Instrumen yang valid adalah instrumen yang memiliki validitas internal serta validitas eksternal. Validitas menurut Sugiyono (2015:112) merupakan mengukur apa yang hendak diukur dan memiliki ketepatan.

Berdasarkan *Item-Total Statistic nilai Corrected Item-Total* untuk masing-masing item dapat dilihat dari tabel 2:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi Product Moment	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas	y1	0,905	0,349	Valid
	y2	0,936	0,349	Valid
	y3	0,717	0,349	Valid
	y4	0,632	0,349	Valid
	y5	0,852	0,349	Valid
Sistem Pengendalian Internal	x11	0,770	0,349	Valid
	x12	0,830	0,349	Valid
	x13	0,729	0,349	Valid
	x14	0,859	0,349	Valid
	x15	0,855	0,349	Valid
Aksesibilitas	x21	0,844	0,349	Valid
	x22	0,830	0,349	Valid
	x23	0,745	0,349	Valid

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Besarnya koefisien korelasi dari 13 butir pernyataan untuk variabel akuntabilitas, SPIP, dan aksesibilitas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai r tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh butir pernyataan yang terdapat pada variabel akuntabilitas, SPIP, dan aksesibilitas adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur berkali – kali menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015:112). Metode pengujian reliabilitas yang digunakan yakni metode Cronbach Alpha. Dengan menggunakan bantuan program SPSS maka dilakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Instrumen pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,70$. Dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Reliabilitas

	Nilai Alpha	Ketentuan nilai Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,867	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,873	0,7	Reliabel
Akseibilitas	0,732	0,7	Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Seluruh butir pernyataan untuk tiap variabel dinyatakan reliabel yang artinya jika *instrument* tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula.

Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik agar variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan menjadi estimator variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas (uji *Kolmogorov Smirnov*) menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.500. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Sig* lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ($\alpha = 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan menerima H_0 , sehingga data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas (Uji VIF) menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0.10 yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson test* diperoleh nilai DW sebesar 1,940. Nilai DU pada $df = 1 = 1,7326$ dan nilai $4-DU = 2,2674$, sehingga nilai DW sebesar 1,940 berada pada kisaran nilai $DU < DW < 4-DU$ atau $1.7326 < 1,940 < 2,2674$. Hal tersebut menunjukkan model regresi bebas masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah (X_1), Akseibilitas (X_2), terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas (Y). Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS, didapat model regresi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.
Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig
		B				
1	(Constant)	1,380	2,021		0,188	0,852
	X1_Sistem pengendalian internal	0,206	0,089	0,212	2,320	0,028
	X2_Akseibilitas	1,385	0,162	0,781	8,551	0,000

a. *Dependent Variable: y_akuntabilitas*

$$Y = 1,380 + 0,206 X_1 + 1,356 X_2 + e$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1,380 dapat diartikan apabila variabel sistem pengendalian internal (X_1), Akseibilitas (X_2) dianggap nol, maka akuntabilitas (Y) sebesar 1,380.
2. Nilai koefisien beta pada sistem pengendalian internal (X_1) sebesar 0,206 artinya setiap perubahan variabel sistem pengendalian internal (X_1) sebesar satu satuan

maka akan mengakibatkan perubahan akuntabilitas (Y) sebesar 0,206 satuan, dengan asumsi-asumsi yang lain adalah tetap. Arah koefisien positif artinya peningkatan satu satuan pada variabel sistem pengendalian internal (X_1) akan menaikkan akuntabilitas (Y) sebesar 0,206 satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel sistem pengendalian internal (X_1) akan menurunkan akuntabilitas (Y) sebesar 0,206 satuan.

3. Nilai koefisien beta pada akseibilitas (X_2) sebesar 1,385 artinya setiap perubahan variabel akseibilitas (X_2) sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan perubahan akuntabilitas (Y) sebesar 1,385 satuan, dengan asumsi-asumsi yang lain adalah tetap. Arah koefisien positif artinya peningkatan satu satuan pada variabel akseibilitas (X_2) akan menaikkan akuntabilitas (Y) sebesar 1,385 satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel akseibilitas (X_2) akan menurunkan akuntabilitas (Y) sebesar 1,385 satuan.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Berikut hasil uji F dari model SPSS 2, pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig
1	Regression	234,573	2	117,286	62,636	0,000 ^a
	Residual	54,302	29	1,872		
	Total	288,875	31			

a. Predictors: (Constant), X2_Akseibilitas, X1_sistempengendalianinternal

b. Dependent Variabel: y_akuntabilitas

Sumber: Data primer, diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.16 nilai F hitung sebesar 62,636 Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 29) adalah sebesar 3,33. Karena F hitung > F tabel yaitu $62,636 > 3,33$ atau nilai Sig. F (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat akuntabilitas (Y) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas sistem pengendalian internal (X_1), akseibilitas (X_2).

Uji t

Uji t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t

tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berikut hasil dari uji t/parsial pada table 6.

Tabel 6. Hasil Uji t / Parsial

Variabel Bebas	t	Sig.
Sistem pengendalian internal (X1)	2,320	0,028
Aksebilitas (X2)	8,551	0,000

Sumber: Data primer, diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6. diperoleh hasil sebagai berikut :

1. t test antara sistem pengendalian internal (X_1) dengan akuntabilitas (Y) menunjukkan t hitung = 2,320. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 29) adalah sebesar 1,69913. Karena t hitung < t tabel yaitu $2,320 > 1,69913$ atau sig. t (0,028) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh sistem pengendalian internal (X_1) terhadap akuntabilitas (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas secara signifikan atau dengan meningkatkan sistem pengendalian internal maka akuntabilitas akan mengalami peningkatan secara nyata.
2. t test antara aksebilitas (X_2) dengan akuntabilitas (Y) menunjukkan t hitung = 8,551. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 29) adalah sebesar 1,69913. Karena t hitung < t tabel yaitu $8,551 > 1,69913$ atau sig. t (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh aksebilitas (X_2) terhadap akuntabilitas (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa aksebilitas mempengaruhi akuntabilitas secara signifikan atau dengan meningkatkan aksebilitas maka akuntabilitas akan mengalami peningkatan secara nyata.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (Uji R^2) adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil dapat dilihat pada tabel 9 digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi dari variabel bebas secara bersama-sama (Simultan) dengan variabel terikat. Hasil uji R^2 dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7.
Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,901	0,812	0,799

Sumber: Data primer, diolah, 2021

Berdasarkan analisis diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,812. Artinya bahwa 81,2% variabel akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu sistem pengendalian internal (X_1), aksebilitas (X_2). Sedangkan sisanya (100%-81,2%) 18,8% variabel akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil dari penelitian menggunakan uji analisis dan regresi linier berganda yang berjudul pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t test antara sistem pengendalian internal (X_1) dengan akuntabilitas (Y) menunjukkan t hitung = 2,320. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 29) adalah sebesar 1,69913. Karena t hitung < t tabel yaitu 2,320 > 1,69913 atau sig. t (0,028) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh sistem pengendalian internal (X_1) terhadap akuntabilitas (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas secara signifikan atau dengan meningkatkan sistem pengendalian internal maka akuntabilitas akan mengalami peningkatan secara nyata.

2. Pengaruh Aksebilitas terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t test antara aksebilitas (X_2) dengan akuntabilitas (Y) menunjukkan t hitung = 8,551. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 29) adalah sebesar 1,69913. Karena t hitung < t tabel yaitu 8,551 > 1,69913 atau sig. t (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh aksebilitas (X_2) terhadap akuntabilitas (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa aksebilitas mempengaruhi akuntabilitas secara signifikan atau dengan meningkatkan aksebilitas maka akuntabilitas akan mengalami peningkatan secara nyata.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Aksebilitas terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 62,636 Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 29) adalah sebesar 3,33. Karena F hitung > F tabel yaitu 62,636 > 3,33 atau nilai Sig. F (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat akuntabilitas (Y) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas sistem pengendalian internal (X_1), aksebilitas (X_2). Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel sistem pengendalian internal dan aksebilitas terhadap akuntabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,812. Artinya bahwa 81,2% variabel akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah (X_1), aksebilitas (X_2). Sedangkan

sisanya (100%-81,2%) 18,8% variabel akuntabilitas dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta secara bersama – sama.

Saran Penelitian

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Kelurahan Margokaton perlu lebih memperhatikan sistem pengendalian internal pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan dalam menyajikan sebuah laporan pengelolaan dana desa, dalam hal ini adalah pegawai bagian keuangan selaku pihak yang menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel atau dapat di pertanggungjawabkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Menambah objek penelitian yang lebih luas tidak hanya satu desa tetapi juga ditambah dengan desa yang lain, sehingga memungkinkan hasilnya lebih baik dari penelitian ini dan diperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Arfianti, Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Arfianti, Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Azizah (2015) Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm. 111 – 120
- Budiawan (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (1), 2014, 276-288

- Fauziyah, Miftahul Reza dan Nur Handayani. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi*, Vol.6, No.6. STISEA Surabaya.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, . Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. Halim, 2007).
- Hasibuan (2018) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Universitas Sumtra Utara*
- Hermanto (2019) Pengaruh Sitem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Volume 20 No. 2. September 2019*
- Hoesada, J., (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ichlas, Muhammad DKK. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164*.
- Ismail Mohamad. (2004). *Manajemen Operasional Sekolah*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya. Kartika, 2015
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2019*. Diakses 17 Maret 2021, .
- Krismiaji, (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Martini, R., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akdemi Akuntansi*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364> Dimensi akuntabilitas (Rasul, 2002),
- Martini, R., Zulkifli, Z., Hartati, S., & Armaini, R. (2018). Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK 45: pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang. *Aptekmas*, 1 (2), 20-29.).
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.

- Mulyana, Budi.(2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. ISSN 2252-6765. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Mustofa. (2012). Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi). Bandung. Alfabeta.
- Nugraha (2010) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi).
- Primayani, Putu Riana. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal, *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahma (2017) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon, Vol. 4 No. 2 (Oktober) 2017
- Riantiaro dan Azlina. (2011). Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas. Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Pekbis. Volume 3.Nomor 3
- Rohman, Abdul. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah), Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/54>
- Sari (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017
- Shafira, (2021). Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi E-Jurnal Akuntansi Vol 31 No 4 April 2021 Hlmn. 1025-1040
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Basuki. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Sekaran, Uma. 2014. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for. Business) Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur, (2009), Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Umar. Husein. (2014). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed Baru 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni dkk, (2014). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Kota Bandung”, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

Widyaningsih (2015) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan. Fokus Ekonomi Vol. 10 No. 2 Desember 2015: 1 – 19
<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/kelurahan-di-sleman-gunakan-dana-desa-untuk-penanganan-covid/3>, diakses pada tanggal 04 maret 2021.

<http://www.slemankab.go.id/17350/dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2018-2019-2020.slm>, diakses pada tanggal 04 maret 2021.

<https://semarang.bisnis.com/read/20170801/536/767190/pemanfaatan-dana-desa-52-temuan-di-sleman-belum-ditindaklanjuti>, diakses pada tanggal 04 maret 2021.